



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15632/SEK/RA1.8/X/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Usulan Revisi Buka Blokir
Mahkamah Agung RI TA 2025

Jakarta, 16 Oktober 2025

Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Di
Jakarta

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran;
- c. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor. 24/WKMA.Y/RA1.8/IX/2025, tanggal 11 September 2025 hal Permohonan Relaksasi Buka Blokir Efisiensi TA 2025;
- d. Surat Menteri Sekretaris Negara RI Nomor: B-14/M/SDK/SA.02/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 hal Persetujuan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
- e. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor. S-546/AG/AG.5/2025 tanggal 1 Oktober 2025, hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Permohonan Relaksasi Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025;
- f. Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor. B-05/MSDK/SA.02/10/2025 tanggal 3 Oktober 2025 hal Persetujuan Pembukaan Blokir Hasil Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025;
- g. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 15219/SEK/OT.01.1/9/2025 tanggal 17 September 2025 hal Permohonan Relaksasi Buka blokir Efisiensi TA 2025;
- h. DIPA Induk Badan Urusan Administrasi Nomor: SP DIPA-005.01-0/2025;
- i. DIPA Petikan Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi Nomor: SP DIPA-005.01.1.663157/2025, DS: 5498-8729-5980-2639;

- j. DIPA Induk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: SP DIPA-005.03-0/2025;
 - k. DIPA Induk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: SP DIPA-005.04-0/2025;
 - l. DIPA Induk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Nomor: SP DIPA-005.05-0/2025;
 - m. DIPA Induk Badan Pengawasan Nomor: SP DIPA-005.07-0/2025;
 - n. DIPA Induk Kepaniteraan Nomor: SP DIPA-005.02-0/2025;
 - o. DIPA Induk Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Nomor: SP DIPA-005.06-0/2025;
 - p. DIPA Petikan Satuan Kerja Pengadilan Agama Pare Pare Nomor: SP DIPA-005.01.2.097631/2025, DS:4115-1477-2303-7408.
2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tema Revisi :
 - Revisi Administrasi
 - b. Tata Cara Revisi:
 - Revisi Buka blokir DIPA TA 2025 karena dokumen merupakan sebagai dasar pengalokasian anggaran telah dilengkapi;
 - Pencantuman/penghapusan/pencatatan halaman IV A DIPA.
3. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:
- Sebagai tindak lanjut atas surat Kementerian Keuangan RI Nomor. S-546/AG/AG.5/2025 tanggal 1 Oktober 2025, hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Permohonan Relaksasi Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2025;
 - Revisi buka blokir dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun 2025 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - Revisi buka blokir atas persetujuan Presiden terkait ijin moratorium Pembangunan gedung kantor Pengadilan TA 2025, serta Revisi buka blokir data dukung satuan kerja yang sudah mendapatkan persetujuan RKBMN kendaraan roda 4.

4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:

- a. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
- b. Surat Pernyataan Eselon I;
- c. Hasil Reviu APIP;
- d. Matriks semula menjadi;
- e. RKA Satker Form A, B, dan C.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Sekretaris Mahkamah Agung RI

Sugiyanto

Tembusan :

1. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Pengawasan MA-RI;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA-RI;
4. Kepala Biro Keuangan MA-RI.